

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5. 1. Simpulan

1. Dalam kosmologi etnis Maluku, yang disebut etnisitas adalah sekumpulan orang yang terikat dengan kosmos negeri atau tanah tumpah darahnya secara geneologis dan menyangkut nama marga yang mencirikan orang Maluku. Etnisitas Maluku secara historis selalu diidentikan dengan dua kelompok etnis besar yang perwilayahannya secara kosmologis dikenal sebagai *patawi* dan *patalima* atau yang disebut *siwalima*. Bersamaan dengan itu Maluku menjadi wilayah kontestasi berbagai suku bangsa yang ada di dunia sebagai imbas dari jalur perdagangan rempah. Pada konteks ini terjadi perjumpaan berbagai suku bangsa yang ada di dunia sehingga dalam perkembangannya, etnisitas Maluku itu *mestizo* dalam arti mengalami percampuran tetapi yang menguatkan adalah orang Maluku mengalami sebuah kerangka kultural yang khas yang terikat secara teritori dan diterima sebagai nilai bersama. Etnis Maluku menganggap dirinya sebagai suatu suku, suatu budaya tersendiri yang dibentuk dari warisan leluhur tetapi juga menjadi akulturasi dari Eropa, Arab dan Cina. Etnisitas Maluku dipahami sebagai kepemilikan akar geneologis yang jelas dan dimaknai sebagai sebuah eksistensi diri, eksistensi kelompok. Dalam perkembangannya etnisitas tidak hanya sebuah konsep tentang asal-usul leluhur tetapi etnisitas berkaitan dengan bukan hanya masalah geografis tetapi juga politik, kultural, dan sangat bersentuhan dengan masalah keadilan. Tidak hanya sebuah komunitas tetapi sebuah martabat, sehingga memandang kebhinnekaan tidak hanya sebatas etnisitas dalam kaitannya dengan persoalan geografis geneologis tetapi mesti dilihat dalam konteks lebih luas supaya menjadi sebuah entitas kultural, entitas keadilan. Etnis Maluku menjadi sangat multikultural dan berada dalam sebuah dinamika bersama, sebuah interaksi bersama yang terintegrasi. Makna persaudaraan yang melekat dalam etnisitas Maluku yang menjadikannya berbeda dengan yang lain adalah karena tidak lahir dari suatu agama tertentu. Persaudaraan dari leluhur yang membentuk etnis Maluku

dahulu baik secara lokal maupun dari penjajahan dan perdagangan rempah, membuat kedekatan itu terbentuk dari keberagaman sejak awalnya. Orang Maluku memiliki konfigurasi budaya yang terbuka menerima suku lain yang terbukti dengan mudahnya diterima dan diberikan posisi tertentu dalam budaya Maluku seperti di Negeri Soya para pendatang itu ada dalam *soa mase*. Etnis Maluku adalah orang yang terbuka terhadap keberagaman sehingga sesungguhnya tidak ada masalah ketika bertemu dengan etnis lain karena orang Maluku mengedepankan saling menghargai dan menganggap orang dari etnis lain bagian dari orang Maluku. Keberterimaan etnis Maluku terhadap etnis lain mempermudah relasi antaretnis di Maluku dalam konteks kebangsaan Indonesia. Tidak ada masalah dalam relasi antaretnis di Maluku kalau tidak dipolitisasi. Sebab kekuatan kultur lokal ada untuk digunakan sebagai katup pengaman dalam upaya menetralsir perbedaan-perbedaan yang ada. Sejarah kelam masa lalu ketika terjadi konflik sosial akibat dipolitisasi menghancurkan relasi antaretnis yang kini kembali dirajut dan diperhadapkan dengan realitas relokasi yang terjadi ketika konflik.

1. Dalam perspektif kebangsaan, orang Maluku tidak pernah ingin mengkhianati perannya yang turut membidani kelahiran Indonesia sebagai sebuah negara merdeka. Realitas kesenjangan menjadi ironi hidup berbangsa bagi etnis Maluku yang perkembangannya tidak sebanding dengan kematangan usianya. Perasaan ketidakadilan menjadi embrio lahirnya politik identitas yang menuntut egaliter di semua bidang kehidupan berbangsa, namun tidak sampai pada tindakan destruktif karena etnis Maluku sadar akan komitmennya sejak awal kepada Indonesia. *Bargaining* politik identitas etnis Maluku merupakan bentuk perlawanan lunak sebagai bentuk kompensasi yang mengharapkan perannya disertakan dalam kehidupan bernegara. Narasi psikokultural termarginal ini harus segera diputuskan oleh pemerintah Indonesia agar tidak menjadi warisan bagi generasi bangsa di Maluku karena berimplikasi buruk bagi nasionalisme dan identitas kebangsaan.
2. Otonomi daerah menjadi lahan subur etnosentrisme bukan cuman di Maluku tetapi di semua daerah. Masalahnya adalah otonomi daerah itu diselenggarakan di dalam spirit Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Munculnya otonomi daerah membuka ruang bagi obsesi-obsesi lokal yang memang sudah tertanam sejak lama yang ingin hadir sebagai bagian dari Indonesia tetapi tidak ingin menegasikan perbedaan itu sehingga otonomi daerah itu dianggap sebagai kesempatan untuk memperkuat identitas-identitas lokal. Etnosentrisme atau politik identitas muncul bersamaan dengan implementasi desentralisasi dan otonomi daerah itu sebagai ekspresi masyarakat lokal untuk menunjukkan eksistensinya. Dalam rangka membangun spirit keindonesiaan maka otonomi daerah itu penting karena juga bermanfaat untuk membuka akses bagi partisipasi publik yang sebesar-besarnya tetapi juga harus terstandar. Otonomi daerah adalah ajang bagi Maluku berbenah diri, berkembang menuju egalitarisme dengan provinsi lain di Indonesia, namun realitasnya terkendala pada regulasi secara nasional dan kemampuan sumber daya manusia yang menjadi warisan politisasi pemerintah di masa lalu.

3. Program Nawa Cita dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukan keberpihakan kepada rakyat Indonesia termasuk rakyat Maluku. Membangun dari laut yang telah lama diimpikan rakyat Maluku sebagai konsekuensi provinsi kepulauan, mulai terealisasi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tol laut, realisasi blok masela dan program lainnya adalah bukti keseriusan pemerintah menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat Maluku. Meskipun demikian, ketidakadilan itu masih saja dirasakan rakyat Maluku karena kesenjangan yang terlanjur menganga lebar selama ini dan upaya merampingkannya perlu waktu dan komitmen bersama semua pihak. Pemerintah perlu mewaspadai kepentingan kelompok tertentu di pusat yang terkesan belum terbuka untuk melihat visi berbangsa sejaca jujur dan objektif, sehingga tarik-menarik kepentingan politik itu luar biasa besar terhadap agenda-agenda Presiden Joko Widodo terkait perkembangan Maluku. Akses itu harus dibuka seluasnya demi pemenuhan hak-hak keewarganegaraan etnis Maluku sebagai perwujudan identitas kebangsaan Indonesia.
4. Loyalitas etnis Maluku kepada Indonesia berbanding lurus dengan rasa nasionalismenya sebagai warga negara. Sudah bukan waktunya lagi untuk

etnisitas dijadikan kendaraan politik identitas. Sudah waktunya etnis Maluku bertransformasi dari nilai-nilai budaya lokal untuk memperkuat jati diri kebangsaan Indonesia. Kesenjangan adalah realitas namun kekitaan adalah takdir Indonesia yang tidak dapat dihindari. Semangat kekitaan sebagai bagian dari identitas Indonesia harus membumi pada semua komponen bangsa dengan dilandasi semangat nilai-nilai Pancasila dalam kebhinnekaan. Maluku butuh strategi kebudayaan yang menempatkan identitas dalam perspektif yang lebih luas dan pendidikan menjadi barometernya untuk mempersiapkan generasi bangsa yang berkomitmen terhadap kebhinnekaan Indonesia. Inilah wujud ideal pendekatan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan yang tepat untuk Maluku.

1.2. Implikasi

1. Etnisitas Maluku memiliki kearifan lokal yang bernilai nasional bahkan global untuk memupuk kemanusiaan yang beradab. Kearifan lokal yang menandai peradaban etnis Maluku memerlukan strategi kebudayaan yang baru untuk bertransformasi menjadi etika sosial yang mengatur relasi hidup bukan hanya secara inklusif tetapi juga secara eksklusif. Tatahan kehidupan yang menjadi modal sosial itu harus terus melembaga dalam struktur kognitif orang Maluku dan diterima sebagai nilai bersama yang kemudian sifatnya bisa mempersatukan, menjadi identitas baru dalam relasi berbangsa. Identitas kemalukuan juga bagian dari identitas nasional sehingga perlu dilakukan dialektika antara identitas kemalukuan dan identitas kebangsaan ini dalam perspektifnya yang baru sehingga ketika membahas tentang identitas kemalukuan bukan tentang identitas separatis tetapi bagian dari identitas kebangsaannya Indonesia. Pada akhirnya, baik identitas kemalukuan maupun identitas daerah lain semuanya adalah identitas yang berciri *cross cutting* di satu pihak mengakar ke masing-masing kultur lokal tetapi di lain pihak mengusung nilai-nilai keindonesiaan. Itulah Bhineka Tunggal Ika yang menjadi identitas Indonesia.
2. Pendekatan kewarganegaraan kemasyarakatan yang tepat untuk Maluku harus menegaskan prinsip berlaku adil untuk keluar dari label marginalitas.

Sesungguhnya tidak ada masalah dengan etnisitas Maluku dan identitas kebangsaan Indonesia jika masalah keadilan sosial diselesaikan. Pemerintah mesti jujur dan objektif dalam membangun Maluku sesuai karakteristik wilayah geografis dan budayanya sebagai masyarakat laut pulau. Inti dari semua retorika tentang nasionalisme orang Maluku bermuara pada masalah keadilan sosial dan kesejahteraan hidup.

1.3. Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah

- a. Hidup domestik yang berelasi dengan orang lain di sekitarnya merupakan relasi yang natural, relasi yang lebih jujur dibandingkan relasi yang terjadi di ruang publik. Ini tantangan untuk menemukan konsep-konsep mengelolah integrasi sosial dalam wilayah-wilayah yang secara geografis tersegregasi sehingga bisa menawarkan sebagai sebuah *local genius* dari Maluku untuk dunia yang juga tersegregasi. Usulan kampung multikultur dari Lembaga Antar Iman di Maluku menjadi *pilot project* diantara wilayah yang tersegregasi, dengan perbandingan 70:30. 70 persen penghuni adalah penduduk asli dan 30 persen penghuni adalah para pendatang yang sudah menetap di Maluku. Pengembangan komunitas berbasis masyarakat merupakan alternatif perlawanan terhadap segregasi. Rekomendasi ini adalah wujud nyata memperjelas Maluku sebagai laboratorium perdamaian agar orang lain bisa datang dan belajar di Maluku. Maluku butuh *spot-spot* interaksi dan integrasi untuk mengeluarkan energi positif, namun semuanya berpulang pada itikad baik dan kebijakan Pemerintah Daerah Maluku. Pendekatan di ruang publik tidak lagi cukup karena ruang publik sangat aktifisial. Pola narasi di ruang publik berbeda dengan pola narasi di ruang domestik karena pertarungan nilai di ruang domestik lebih kuat dari pada di ruang publik.
- b. Menghadapi persaingannya yang lebih positif dan dinamis, dibutuhkan pola pengelompokan lokal yang potensial sehingga merumuskan konsep tentang manajemen masyarakat plural itu sebuah kebutuhan tidak hanya di Maluku tetapi juga di tingkat nasional dan dibutuhkan pembahasan lanjutan terkait

formulasinya. Maluku memiliki cukup instrumen untuk membangun konsep manajemen masyarakat plural yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal, hanya saja dibutuhkan kearifan dari pemangku kebijakan di semua tingkatan serta kapasitas yang cukup untuk melirik kekuatan lokal dan menjadikannya sebagai alat untuk membangun bersama. Pemerintah merencanakan pembangunan yang melibatkan kelompok-kelompok sosial yang sudah dibangun sejak dahulu dalam pranata adat dan sosial masyarakat Maluku sehingga pembangunan tidak memunculkan alienasi atau keterasingan. Pola pengelompokan sosial jauh lebih diakrabi ketimbang membentuk kelompok dengan mengumpulkan orang baru.

1. Bagi Masyarakat Maluku

- a. Memori kolektif tentang karakter dan kultur orang Maluku membutuhkan rekonstruksi perspektif kultur baru yang berpikir tentang masa depan yang kompetitif. Percuma berpikir tentang konflik Maluku dan kemudian menjadi beban historis yang menghambat masa depan. Orang Maluku butuh sebuah rekonstruksi budaya baru yang memungkinkan orang Maluku lebih terbuka untuk masa depan, lebih berpikir positif, kompetitif secara lebih terbuka melalui etika publik *base on cultur* untuk berkembang secara bersama dan saling menopang.

2. Bagi Peneliti

- a. Penelitian ini baru sebatas gambaran tentang etnisitas Maluku hubungannya dengan identitas kebangsaan Indonesia. Perlu penelitian lanjutan untuk mengkaji lebih dalam tentang pranata lokal Maluku seperti *pela* yang ditransformasikan menjadi etika sosial yang mengatur bukan hanya antar masyarakat yang *berpela* tetapi juga relasi keluar dengan etnis lain di Indonesia.
- b. Penelitian ini menarik untuk dilanjutkan khusus mengkaji tentang *community civic* yang berbasis budaya Maluku untuk memperkuat identitas kebangsaan. Budaya Maluku kental dengan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi jadi diri Indonesia dalam Pancasila, yang perlu digali dan diperkenalkan di ranah publik sebagai *civic culture* orang Maluku.